

Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

Edi Siswanto, Itok Wicaksono, Emi Kholifah

Fakultas Ilmu Social Dan Politik

budieka@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to describe the Role of Local Village Facilitators in Empowerment in Balung Lor Village, Balung District, Jember Regency. In this study using a qualitative approach method. In this study the data source was obtained from the Village Office and PMD Balung Lor, Balung Lor District, Jember Regency. Data collection through interviews, observation, and documentation. In the Research of the Companion Role of Balung Lor Village.

Keyword : Role of Companion of Local Villages in Empowerment in Balung Lor Village, Balung District, Jember Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Sumber data diperoleh dari Kantor Desa dan PMD Balung Lor Kecamatan Balung Lor Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam Penelitian Peran Pendamping Desa Balung Lor.

Kata kunci :Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan pembangunan desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Perlu di ketahui di Kabupaten Jember terdapat 300-an lebih Pendamping Lokal Desa

yang tersebar di 28 kecamatan. Tenaga pendamping desa ini diseleksi dalam beberapa tahap dan telah melalui proses yang panjang. Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember termasuk desa yang mendapatkan tenaga pendamping lokal desa yang sudah berjalan aktif pada tanggal 03 Maret 2016 yang lalu.

Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Balung ada 2 orang pendamping lokal desa yang masing masing membawahi 3 desa. Hal ini menjadikan fokus kerja pendamping lokal desa terbagi tidak dapat fokus mendampingi satu desa. dalam hal ini peneliti ingin melihat Peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Balung Lor.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti tanggal 17 Juni 2019 kepada Abdul Hadi selaku Kasi PMD Kecamatan Balung Kabupaten Jember, diketahui bahwa Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan tersebut terdapat permasalahan mengenai Peran yang sangat mempengaruhi peningkatan pembangunan desa. Hal ini menjadi perhatian bagi para Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran kerja Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan di desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Apa tantangan Pendampingan Lokal desa dalam peran pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
3. Apa manfaat Pendamping Lokal Desa dalam peran pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran apa saja yang telah dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dalam kerja pemberdayaan di desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tantangan Pendampingan Lokal desa dalam peran dalam pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui manfaat Pendamping Lokal Desa dalam peran dalam pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Desa Balung Lor

2.1.1 Sejarah Desa

Menurut sejarah lesan masyarakat desa, nama Desa Balung Lor, dimunculkan Pertama kali oleh Mbah Budeng, asal kata Balung berasal dari ditemukannya Mbah Mpuk Lanang yang sudah meninggal berupa tengkorak diatas pohon. Mbah Mpuk atau Mbah Budeng adalah Nama Samaran dari Ki Bondan Kebalen seorang Pendatang dari Mataram. Setelah setahun tidak ada kabar beritanya, maka Mbah Mpuk Putri mencari suaminya yang bernama Mbah Mpuk Lanang atau Ki Bondan Kebalen, namun saat ditemukan Mbah Mpuk Lanang sudah dalam keadaan meninggal dunia diatas pohon dan sudah menjadi tengkorak. Untuk mengingat Jasa-jasa yang telah diperbuat oleh Mbah Mpuk Lanang, maka Mbah Mpuk Putri memberi nama tanah hasil babatan hutan Mbah Puk dengan nama Balung yang berarti adalah Tulang, Selanjutnya hasil babatan

hutan yang kerah barat diberi nama Balung Lor, Babatan ke Selatan diberi nama Balung Kidul dan yang kearah utara diberi nama Balung Lor.

2.1.2 Geografi dan Demografi Desa

Desa Balung Lor terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan memiliki luas Administrasi 900 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu :

1. Dusun Karang Anyar
2. Dusun Krajan
3. Dusun Kebon Sari
4. Dusun Wetan Kali

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara :
Desa Gumelar
- b. Sebelah Timur :
Desa Glundengan
- c. Sebelah Selatan :
Desa Balung Lor
- d. Sebelah Barat :
Desa Karag Semanding

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	200
2	Luas Persawahan	600
3	Luas ladang	25
4	Luas Perkebunan	-
5	Hutan Negara	-
6	Padang gembala	-
7	Danau	-
8	Luas Kuburan	3
9	Luas Pekarangan	58
10	Luas Taman	-
11	Luas Perkantoran	12
12	Luas Prasarana Umum lainnya	2
	Luas Wilayah	900

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	31
	b. Tanah Titi Sara	1
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-
2	Lapangan Olahraga	2
3	Perkantoran pemerintah	7
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	3
6	Tempat pembuangan sampah	1
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	5
8	Pertokoan	2
9	Fasilitas pasar	2
10	Terminal	-
11	Tanah utk Jalan	-
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha perikanan	-
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	54

L. Kelembagaan Desa

2.3 Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan di Desa Balung Lor

2.3.1 Peran Pemberdayaan dalam Pembangunan Desa

Pendamping Lokal Desa masa tugasnya di Desa Balung Lor sudah terhitung 4 tahun lebih. Komunikasi antara PLD dengan perangkat desa juga tidak ada hambatan yang berarti. Bisa disimpulkan keberhasilan Pendamping Lokal Desa di Desa Balung Lor dalam bekerja sama dengan pemerintah Desa Balung Lor merupakan keberhasilan peran pemberdayaan untuk tugas melaksanakan

upaya pemberdayaan pembangunan desa bagi pemerintahan desa.

2.3.2 Peran dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Menurut Pendamping Lokal Desa Bapak Lukman Hakim bahwa proyeksi yang pemerintah Desa Balung Lor dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Menurut Bapak Lukman Hakim bahwa perencanaan desa di Desa Balung Lor dilaksanakan dengan susunan dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun

Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ini tertera dalam UU Desa Pasal 79 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pembangunan Desa). Dari hasil Musrenbang tersebut dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembangunan akan dilakukan dengan arahan Pendamping Lokal Desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai pembangunan yang ingin dibangun didesa tersebut, Pendamping Lokal Desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Terkait dengan upaya meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, pengembangan usaha ekonomi Desa dan pendayagunaan sumber daya alam, maka Pendamping Lokal Desa Bapak Lukman Hakim mendampingi pemerintah desa untuk membangun balai desa Balung Lor sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat berkumpul, mendapatkan informasi dan merupakan tempat pelayan administrasi di Balung Lor.

Untuk meningkatkan kualitas dari aparatur pemerintahan dan daya kritis masyarakat, Sebagai Pendamping Lokal Desa di desa Balung Lor telah memberikan beberapa pelatihan dan pembekalan kepada aparatur pemerintah Balung Lor dan masyarakat dalam kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di Desa Balung Lor. Pelatihan-pelatihan yang telah diberikan sesuai Laporan Kegiatan Bulanan Bapak Lukman di Desa balung Lor.

2.3.3 Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapak Lukman Hakim selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) di Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat Balung Lor untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial serta forum-forum musyawarah sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.

Dalam komunikasi yang dilakukan oleh bapak Lukman Hakim dengan kelompok-kelompok masyarakat Balung Lor dan juga dengan aparat pemerintahan Balung Lor mendapatkan banyak permasalahan yang ada di desa Balung Lor yaitu masalah keadilan pembagian air irigasi bagi petani miskin, ketidakpastian harga hasil pertanian, lahan sawah yang semakin sempit, tidak adanya penataan tata wilayah pedesaan, sewa

sawah yang terlalu mahal, dan lain sebagainya.

2.4 Tantangan Pendamping Lokal Desa

Peran Pendamping Lokal Desa akan mempermudah pekerjaan pemerintah desa untuk mewujudkan kemajuan desa. Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan dilakukan Peneliti, yaitu desa Balung Lor yang menjabat di desa tersebut tergolong orang lama yang masih menjabat dari tahun ke tahun tanpa ada pergantian jabatan. Kinerja perangkat desa dinilai kurang baik dengan melihat program kegiatan pembinaan yang tidak semua berjalan sistematis. Dengan demikian perlu adanya evaluasi dalam peningkatan SDM untuk melakukan pergantian staf atau kader perangkat desa yang lebih kompeten sehingga pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pendamping lokal desa, menurut Bapak Lukman Hakim, tantangan yang dihadapinya dapat dirangkum dari 3 hal, yaitu komunikasi, Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

4.5 Manfaat Pemberdayaan Pendamping Lokal Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa manfaat peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan di desa Balung Lor belum sepenuhnya dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Balung Lor, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Desa Balung Lor dalam segi pembangunan berjalan efektif karena ada bentuk nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur, akan tetapi belum dikatakan efisien karena sumber daya tidak diberdayakan secara optimum.
2. Manfaat Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan desa cukup dirasakan oleh masyarakat Dusun Kebonsari namun kurang dirasakan di Dusun Karang Anyar.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran pemberdayaan Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan desa dimulai dengan menjalin hubungan akrab dengan aparat desa. Kemudian peran pemberdayaan pembangunan desa yang dilakukan Pendamping Lokal Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:
 - a. Tahap Perencanaan, meliputi Musrenbangdes, Survey lokasi, dan penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembangunan
 - b. Tahap Pelaksanaan, meliputi; pendampingan dalam proses pengerjaan pembangunan, menyiapkan material, Penyediaan tenaga kerja (Tukang) sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan memonitoring pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa
 - c. Tahap pemantauan : pengawasan dan evaluasi secara terperinci dari tahap perencanaan sampai selesai sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan, dan membuat LPJ yang berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan agar sesuai dengan rencana.

Dalam pelaksanaan peran pemberdayaan, Pendamping lokal desa menemukan beberapa temuan di lapangan khususnya di Dusun Karang Anyar Desa, yaitu kurang adanya aspirasi masyarakat dalam forum rembuk desa dan Musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan

pembangunan perlu ditingkatkan karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam pemerintahan desa juga ditemukan kurang transparansinya dalam pengelolaan dana desa, sehingga transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan

2. Tantangan yang dihadapi pendamping desa dalam pelaksanaan peran pemberdayaan desa yaitu yaitu komunikasi, Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) :

- a. Komunikasi ; dari dua desa yang diteliti, di desa Balung Lor menunjukkan sosialisasi yang belum optimal. Kurang menunjukkan adanya komunikasi dua arah dan kurang ada kesempatan untuk bernegosiasi dalam memberikan masukan atau pendapat dalam program pembangunan
- b. Birokrasi; Dari temuan dilapangan, Desa Balung lor belum sepenuhnya menjalankan program secara efektif karena kapabilitas perangkat desa masih lemah menjalankan tupaksinya. Walaupun sudah terjalin hubungan yang akrab antara kepala desa dan Pendamping lokal desa.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Balung Lor, maka perlu adanya peran pemerintah untuk merangsang

masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Pendamping harus melakukan pendekatan sosial, pendekatan yang dilakukan lebih sering berkomunikasi dengan desa dan masyarakatnya sehingga akan terjalin ikatan yang baik.
3. Kualitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Kenaca Prenada Media Group: Jakarta
- Chalik Abdul, dkk, 2015. Pelayanan Publik Tingkat Desa, Interpena: Yogyakarta
- Chalik Abdul, 2016. Laporan Survey kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Desa The Sunan Giri Award Tahun 2016, Gresik
- Chalik Abdul, dkk, 2015. Pelayanan Publik Tingkat Desa, Interpena: Yogyakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Lokal Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Petunjuk Teknis Pendampingan Desa.

